

Konstruksi Makna Bela Negara pada ASN: Studi Interaksi Simbolik Terhadap Program Komponen Cadangan (Komcad)

Novawan Aditya Ristara*, Bintoro Wardiyanto

Universitas Airlangga, Indonesia

Email: novawan.aditya.r@gmail.com*, binro.wardiyanto@fisip.unair.ac.id

Keywords	Abstract
national defense; State Civil Apparatus (ASN); reserve component; symbolic interaction; construction of meaning.	<i>National defense is a national value that continues to experience evolving meanings along with social, political, and dynamic changes in national defense. The State Civil Apparatus (ASN), as a crucial element in government administration, plays a strategic role in supporting the implementation of national defense values, including through the Reserve Component Program (Komcad) as part of the overall defense system. This study aims to analyze the construction of the meaning of national defense among ASN through the perspective of symbolic interaction in the Komcad Program. The study uses a qualitative approach with a literature study method sourced from scientific articles, books, policy documents, and relevant previous research results. The analysis was conducted using Herbert Blumer's symbolic interaction theory, which emphasizes the concepts of meaning, language, and thought in the process of social meaning formation. The results show that the meaning of national defense among ASN is formed through social interactions that take place within the bureaucracy, education, family, mass media, and digital media. Komcad is interpreted variously as a symbol of patriotism, devotion to the state, discipline, character building, and a form of citizen participation in the national defense system. This diversity of interpretations demonstrates that Komcad is not only understood as an instrument of national defense, but also as a social symbol that is continuously constructed through communication and interpretation. Therefore, strengthening the values of national defense and socializing Komcad requires a more communicative, participatory, and contextual approach to align with the evolving dynamics of meaning among civil servants (ASN).</i>
Kata Kunci:	Abstrak
bela negara; Aparatur Sipil Negara (ASN); komponen cadangan; interaksi simbolik; konstruksi makna.	Bela negara merupakan nilai kebangsaan yang terus mengalami perkembangan makna seiring perubahan sosial, politik, dan dinamika pertahanan negara. Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi nilai-nilai bela negara, termasuk melalui Program Komponen Cadangan (Komcad) sebagai bagian dari sistem pertahanan semesta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi makna bela negara pada ASN melalui perspektif interaksi simbolik terhadap Program Komcad. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur yang bersumber dari artikel ilmiah, buku, dokumen kebijakan, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis dilakukan menggunakan teori interaksi simbolik Herbert Blumer yang menekankan konsep meaning (makna), language (bahasa), dan thought (pemikiran) dalam proses pembentukan makna sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna bela negara pada ASN dibentuk melalui proses interaksi sosial yang berlangsung dalam lingkungan birokrasi, pendidikan, keluarga, media massa, dan media digital. Komcad dimaknai secara beragam sebagai simbol patriotisme, pengabdian kepada negara, kedisiplinan,

pembentukan karakter, serta bentuk partisipasi warga negara dalam sistem pertahanan nasional. Keberagaman pemaknaan tersebut menunjukkan bahwa Komcad tidak hanya dipahami sebagai instrumen pertahanan negara, tetapi juga sebagai simbol sosial yang terus dikonstruksi melalui proses komunikasi dan interpretasi. Oleh karena itu, penguatan nilai bela negara dan sosialisasi Komcad perlu dilakukan melalui pendekatan yang lebih komunikatif, partisipatif, dan kontekstual agar sesuai dengan dinamika pemaknaan yang berkembang di kalangan ASN.

PENDAHULUAN

Bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan terhadap bangsa dan negara serta kesadaran untuk berpartisipasi dalam menjaga kedaulatan negara sesuai kapasitas masing-masing. (Afifi et al., 2024) menjelaskan bahwa konsep bela negara perlu direkonstruksi dari sekadar jargon normatif menjadi pendekatan yang lebih empiris dan berorientasi pada praktik kewargaan. Dalam konteks kontemporer, bela negara tidak lagi dipahami secara terbatas sebagai keterlibatan dalam aktivitas militer, tetapi juga mencakup penguatan nasionalisme, tanggung jawab sosial, literasi digital, serta kemampuan menghadapi berbagai ancaman nonmiliter. Perkembangan makna tersebut menunjukkan bahwa bela negara merupakan konstruksi sosial yang terus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika masyarakat. Dalam perspektif interaksi simbolik, makna bela negara terbentuk melalui proses interpretasi individu terhadap simbol, pengalaman, dan interaksi sosial yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari (Hasim et. al., 2023) (Poerana et. al., 2023).

Meskipun memiliki posisi strategis dalam pembangunan karakter kebangsaan, implementasi nilai bela negara menghadapi berbagai tantangan di era digital. Arus informasi yang cepat melalui media sosial memungkinkan masyarakat memperoleh beragam narasi mengenai nasionalisme, pertahanan negara, dan kewargaan dari berbagai sumber yang tidak selalu memiliki pemahaman yang sama. Kondisi tersebut memunculkan perbedaan persepsi terhadap praktik bela negara, termasuk terhadap kebijakan pertahanan yang melibatkan partisipasi warga negara. Berbagai negara menunjukkan dinamika serupa. Di Korea Selatan, sistem wajib militer menjadi bagian penting dalam pertahanan negara, namun juga memunculkan perdebatan terkait kepercayaan terhadap institusi militer dan kesetaraan sosial (Bae & Lee, 2025). Di Rusia, wajib militer dipahami tidak hanya sebagai instrumen pertahanan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan identitas dan budaya militer dalam masyarakat (Eichler, 2022). Sementara itu, sejumlah kajian menyoroti bahwa kebijakan wajib militer dan pertahanan berbasis warga negara juga menghadapi perdebatan mengenai hak individu, kebebasan sipil, dan legitimasi sosial (Baran, 2024; Caltekin, 2022). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pemaknaan terhadap bela negara tidak bersifat tunggal, melainkan dibentuk melalui proses sosial yang kompleks. Perkembangan media sosial turut membentuk berbagai narasi mengenai nasionalisme dan bela negara yang dapat memengaruhi cara generasi muda memaknai kewargaan dan tanggung jawab terhadap negara. Media sosial menjadi arena pertukaran simbol dan makna yang memungkinkan munculnya beragam interpretasi mengenai bela negara, baik yang mendukung maupun yang mempertanyakan relevansinya dalam kehidupan kontemporer (Nathaniela & Megawati, 2025). Kondisi tersebut memperkuat pentingnya literasi digital

sebagai bagian dari upaya bela negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter pada era digital (Citanindya & Puspa, 2025).

Salah satu upaya pemerintah dalam memperkuat sistem pertahanan negara sekaligus menanamkan nilai bela negara adalah melalui Program Komponen Cadangan (Komcad). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, Komponen Cadangan merupakan sumber daya nasional yang dipersiapkan untuk memperbesar dan memperkuat komponen utama pertahanan negara. Program ini memberikan pelatihan dasar kemiliteran, wawasan kebangsaan, serta pembentukan karakter disiplin sebagai bentuk partisipasi warga negara dalam sistem pertahanan semesta. Hidayat (2022) menegaskan bahwa keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Komcad merupakan bagian dari penguatan kapasitas sumber daya manusia nasional yang mendukung pertahanan negara, sedangkan Nurwahyu et. al. (2022) menunjukkan bahwa partisipasi ASN dalam Komcad berpotensi memperkuat kesadaran bela negara dan kesiapsiagaan nasional. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Samosir et. al. (2023) yang menjelaskan bahwa implementasi Komcad dapat menjadi instrumen penguatan nilai kebangsaan dan pertahanan di berbagai sektor masyarakat. Fenomena serupa juga ditemukan di berbagai negara. Jonsson et. al. (2024) menunjukkan bahwa sistem conscription di sejumlah negara Eropa tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pertahanan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan identitas kewargaan dan tanggung jawab sosial. Di Ukraina, reformasi militer yang melibatkan partisipasi warga negara terbukti berkontribusi terhadap peningkatan kesiapan pertahanan nasional dalam menghadapi ancaman keamanan (Sanders, 2023). Sementara itu, di Korea Selatan, sistem wajib militer dipandang sebagai instrumen penting bagi pertahanan negara, namun pada saat yang sama memunculkan perdebatan mengenai kepercayaan terhadap institusi militer dan persepsi generasi muda terhadap kewajiban negara (Bae & Lee, 2025). Meskipun demikian, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa program pertahanan berbasis warga negara tidak selalu dimaknai secara seragam. Herawati et. al. (2025) menemukan bahwa sebagian mahasiswa memandang Komcad sebagai sarana pembentukan karakter dan pengabdian kepada negara, sedangkan Kusuma (2022) serta Suwartono (2025) menunjukkan adanya kekhawatiran terkait aspek sosial, pekerjaan, dan posisi hukum warga sipil dalam program tersebut. Perbedaan pandangan tersebut mengindikasikan bahwa makna Komcad tidak terbentuk secara tunggal, melainkan dikonstruksi melalui proses interaksi sosial dan interpretasi individu terhadap simbol-simbol bela negara.

Penelitian mengenai Komcad sebelumnya lebih banyak berfokus pada implementasi kebijakan (Samosir et. al., 2023), partisipasi ASN dalam sistem pertahanan negara (Nurwahyu et. al., 2022), urgensi rekrutmen ASN dalam Komcad (Hidayat, 2022), persepsi mahasiswa terhadap Komcad (Herawati et. al., 2025), serta aspek hukum dan dualisme status anggota Komcad (Suwartono, 2025). Pada konteks internasional, penelitian mengenai conscription dan reserve force umumnya menyoroti aspek keamanan nasional, hubungan sipil-militer, dan transformasi sosial (Jonsson et. al., 2024; Bae & Lee, 2025). Namun, penelitian yang secara khusus menganalisis konstruksi makna bela negara terhadap Komcad melalui perspektif interaksi simbolik masih relatif terbatas. Berbagai penelitian internasional juga lebih banyak membahas conscription dan reserve force dari perspektif keamanan nasional, hubungan sipil-militer, kepercayaan terhadap institusi negara, maupun transformasi sosial yang

ditimbulkannya (Bove et al., 2024; Kuehn & Croissant, 2023; Lillemäe et. al., 2024). Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana makna bela negara dikonstruksi melalui simbol, pengalaman, dan interaksi sosial yang berkaitan dengan Program Komcad masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menggunakan perspektif interaksi simbolik untuk menjelaskan bagaimana makna bela negara dibentuk, dinegosiasikan, dan direkonstruksi melalui pemahaman terhadap Komcad sebagai simbol sosial.

Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menggunakan perspektif interaksi simbolik untuk menjelaskan bagaimana makna bela negara dibentuk, dinegosiasikan, dan direkonstruksi melalui pemahaman terhadap Komcad sebagai simbol sosial. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengkajian konstruksi makna bela negara pada ASN dengan pendekatan interaksi simbolik yang belum banyak dilakukan dalam studi pertahanan di Indonesia. Urgensi penelitian ini didasarkan pada pentingnya pemahaman mendalam tentang proses pemaknaan bela negara di kalangan ASN sebagai aktor strategis dalam implementasi kebijakan pertahanan negara.

Pemahaman mengenai konstruksi makna bela negara menjadi penting karena keberhasilan program pertahanan negara tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan kebijakan, tetapi juga oleh bagaimana simbol dan nilai yang terkandung di dalamnya dimaknai oleh masyarakat. Dalam perspektif interaksi simbolik, makna yang dibangun individu akan memengaruhi sikap dan tindakan mereka terhadap suatu program (Blumer, 1969; Mead, 1934). Oleh karena itu, memahami bagaimana Komcad dimaknai sebagai simbol bela negara dapat menjadi dasar dalam merumuskan strategi komunikasi publik yang lebih efektif dan sesuai dengan karakteristik masyarakat digital kontemporer. Penelitian ini penting dilakukan karena bela negara pada era digital tidak hanya berkaitan dengan aspek pertahanan formal, tetapi juga menyangkut pembentukan kesadaran kebangsaan, identitas kewargaan, dan partisipasi sosial masyarakat. Pemahaman mengenai konstruksi makna bela negara dalam konteks Komcad dapat memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan strategi komunikasi publik yang lebih partisipatif dan sesuai dengan karakteristik masyarakat kontemporer. Selain itu, penelitian ini juga memperkaya kajian interaksi simbolik dalam bidang pertahanan dan keamanan yang masih relatif terbatas dibandingkan kajian kebijakan maupun hubungan sipil-militer. Dengan memahami bagaimana makna bela negara dibangun melalui interaksi sosial, simbol, dan pengalaman, penguatan nilai bela negara dapat dilakukan secara lebih kontekstual dan adaptif terhadap perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menjelaskan fenomena sosial secara mendalam melalui eksplorasi makna, interpretasi, serta proses konstruksi realitas yang berkembang dalam masyarakat. Studi literatur dilakukan dengan menelaah berbagai sumber ilmiah berupa artikel jurnal, buku, dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas konsep bela negara, Aparatur Sipil Negara (ASN),

Program Komponen Cadangan (Komcad), serta teori interaksi simbolik (Afifi et. al., 2024; Hidayat, 2022; Nurwahyu et. al., 2022). Pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, seleksi, evaluasi, dan analisis berbagai literatur yang relevan sehingga diperoleh

pemahaman yang komprehensif mengenai konstruksi makna bela negara dan Komcad di kalangan ASN.

Penelitian ini menggunakan teori interaksi simbolik sebagai perspektif analisis utama. Menurut Mead (1934) dan Blumer (1969), makna tidak muncul secara alamiah, melainkan terbentuk melalui proses interaksi sosial dan interpretasi terhadap simbol-simbol yang diterima individu. Interaksi simbolik memandang manusia sebagai aktor yang secara aktif menafsirkan realitas sosial berdasarkan pengalaman, komunikasi, dan lingkungan sosial yang melingkupinya (Blumer, 1980; (Dalpé et. al., 2023). Oleh karena itu, pendekatan ini relevan untuk menjelaskan bagaimana ASN membangun pemahaman mengenai bela negara dan Komcad melalui berbagai interaksi yang berlangsung dalam lingkungan birokrasi, pendidikan, media, maupun kehidupan sosial sehari-hari.

Analisis penelitian difokuskan pada tiga konsep utama dalam teori interaksi simbolik, yaitu meaning (makna), language (bahasa), dan thought (pemikiran) (Blumer, 1969). Konsep makna digunakan untuk mengidentifikasi berbagai interpretasi ASN terhadap bela negara dan Komcad. Konsep bahasa digunakan untuk memahami peran komunikasi organisasi, narasi kebijakan, media massa, dan media digital dalam membentuk persepsi ASN terhadap program tersebut. Sementara itu, konsep pemikiran digunakan untuk menjelaskan proses refleksi individu ketika menafsirkan simbol-simbol kebangsaan, pengabdian kepada negara, serta partisipasi dalam sistem pertahanan nasional (Widiarti et. al., 2023; Poerana et. al., 2023). Ketiga konsep tersebut menjadi landasan dalam memahami konstruksi makna yang berkembang di kalangan ASN.

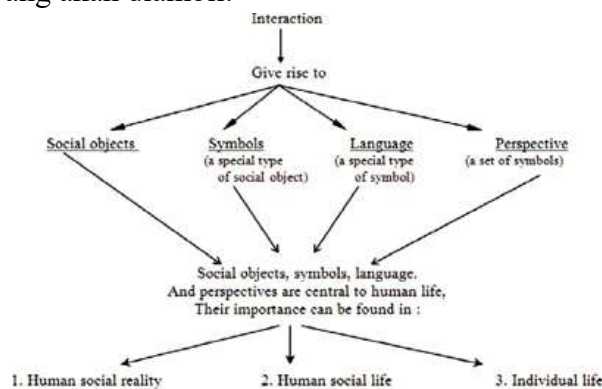
Analisis data dilakukan melalui teknik analisis isi (content analysis) terhadap berbagai sumber literatur yang telah dikumpulkan. Setiap data dikategorikan berdasarkan tema-tema yang berkaitan dengan bela negara, peran ASN dalam pertahanan negara, representasi Komcad, partisipasi kewargaan, serta proses interaksi simbolik yang memengaruhi pembentukan makna (Rahman et al., 2023; Samosir et. al., 2023). Selanjutnya, data diinterpretasikan secara deskriptif dan kritis untuk menjelaskan hubungan antara simbol, interaksi sosial, dan konstruksi makna yang muncul dalam pemahaman ASN mengenai bela negara dan Komcad.

Penggunaan pendekatan interaksi simbolik dalam penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa pemaknaan bela negara tidak bersifat tunggal dan statis, melainkan terus dikonstruksi melalui interaksi sosial yang berlangsung dalam lingkungan kerja, pendidikan, keluarga, komunitas, maupun media digital (Blumer 1969; Hasim et. al., 2023). Perspektif ini memungkinkan penelitian memahami Komcad bukan hanya sebagai instrumen pertahanan negara yang diatur secara formal, tetapi juga sebagai simbol sosial yang dimaknai secara beragam oleh ASN (Hidayat, 2022; Nurwahyu et. al., 2022). Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih kontekstual mengenai hubungan antara simbol bela negara, pengalaman sosial, dan konstruksi makna ASN terhadap Program Komponen Cadangan dalam kerangka sistem pertahanan semesta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan Interaksi Simbolik dalam Memahami Konstruksi Makna Bela Negara

Interaksi simbolik merupakan salah satu perspektif sosiologi yang menjelaskan bagaimana manusia membentuk makna melalui proses interaksi sosial. Perspektif ini berakar pada pemikiran George Herbert Mead yang kemudian dikembangkan secara sistematis oleh Blumer (1980) melalui Mazhab Chicago School. Menurut Blumer, tindakan manusia tidak semata-mata ditentukan oleh struktur sosial atau kondisi objektif yang berada di luar dirinya, melainkan oleh makna yang diberikan individu terhadap objek, peristiwa, maupun simbol yang mereka hadapi. Makna tersebut tidak muncul secara alami, tetapi terbentuk melalui interaksi sosial dan terus mengalami perubahan melalui proses interpretasi yang dilakukan individu dalam kehidupan sehari-hari (Citanindya & Puspa, 2025). Oleh karena itu, interaksi simbolik memandang manusia sebagai aktor aktif yang senantiasa menafsirkan realitas sosial sebelum menentukan tindakan yang akan diambil.



Gambar 1. Peta Pendekatan Interaksi Simbolik

Source: (Charon, 1979)

Gambar 1 menunjukkan bahwa interaksi merupakan elemen utama dalam pembentukan realitas sosial menurut perspektif interaksi simbolik. Charon (1979) menjelaskan bahwa melalui proses interaksi, manusia membangun pemahaman terhadap berbagai objek sosial melalui simbol, bahasa, dan perspektif yang dimilikinya. Objek sosial tidak memiliki makna yang bersifat tetap, melainkan memperoleh arti melalui proses komunikasi dan interpretasi yang berlangsung secara terus-menerus. Simbol dan bahasa berfungsi sebagai media yang memungkinkan individu memahami, menegosiasikan, dan menyampaikan makna kepada orang lain, sedangkan perspektif memengaruhi cara individu menafsirkan suatu fenomena berdasarkan pengalaman, nilai, dan lingkungan sosial yang dimiliki. Interaksi antara keempat unsur tersebut kemudian membentuk realitas sosial, kehidupan sosial, dan tindakan individu. Dalam konteks penelitian ini, bela negara dan Program Komponen Cadangan (Komcad) dapat dipahami sebagai objek sosial yang dimaknai secara berbeda oleh Generasi Z melalui berbagai interaksi yang terjadi dalam keluarga, institusi pendidikan, lingkungan pertemanan, maupun media digital. Oleh karena itu, pemahaman Generasi Z terhadap bela negara dan Komcad tidak semata-mata ditentukan oleh definisi formal yang diberikan negara, tetapi juga oleh proses interpretasi terhadap simbol-simbol kebangsaan yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari (Charon, 1979). Kerangka tersebut menunjukkan bahwa makna sosial terbentuk melalui proses interaksi yang melibatkan simbol, bahasa, dan interpretasi individu. Pemahaman ini sejalan dengan pemikiran para tokoh interaksi simbolik, khususnya George Herbert Mead dan

Herbert Blumer, yang menekankan pentingnya komunikasi dan proses pemaknaan dalam membentuk tindakan sosial.

Perspektif interaksi simbolik berangkat dari asumsi bahwa masyarakat dibentuk melalui proses komunikasi yang berlangsung secara terus-menerus. Dalam pandangan Mead (1934), manusia memiliki kemampuan unik untuk menggunakan simbol, memahami simbol yang digunakan orang lain, serta memberikan makna terhadap simbol tersebut. Kemampuan inilah yang membedakan manusia dari makhluk lainnya dan memungkinkan terbentuknya kehidupan sosial yang kompleks. Simbol dapat berupa bahasa, tindakan, gestur, nilai, maupun berbagai representasi sosial yang memiliki arti tertentu dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, realitas sosial tidak dipahami sebagai sesuatu yang bersifat tetap, melainkan sebagai hasil konstruksi yang terus dibentuk melalui interaksi dan komunikasi antarmanusia (Hasim et. al., 2023).

Menurut Blumer (1969), terdapat tiga premis utama dalam interaksi simbolik. Pertama, manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna yang dimiliki terhadap sesuatu tersebut. Kedua, makna muncul dari proses interaksi sosial yang dilakukan individu dengan lingkungan sosialnya. Ketiga, makna tersebut dimodifikasi melalui proses interpretasi ketika individu berhadapan dengan berbagai situasi sosial yang berbeda (Citanindya & Puspa, 2025). Ketiga premis tersebut menunjukkan bahwa tindakan seseorang tidak dapat dipahami hanya melalui faktor eksternal, tetapi harus dilihat dari bagaimana individu memaknai suatu fenomena. Dalam konteks penelitian ini, pemahaman Generasi Z terhadap bela negara dan Program Komponen Cadangan (Komcad) tidak dapat dilepaskan dari proses pemaknaan yang terbentuk melalui interaksi sosial yang mereka alami.

Lebih lanjut, Blumer (1969) menjelaskan bahwa interaksi simbolik dibangun atas tiga konsep utama, yaitu *meaning* (makna), *language* (bahasa), dan *thought* (pemikiran). Konsep makna menjelaskan bahwa setiap individu memberikan interpretasi tertentu terhadap objek sosial yang dihadapinya. Dalam konteks bela negara, Generasi Z dapat memiliki makna yang berbeda-beda mengenai konsep tersebut. Sebagian memandang bela negara sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa, sementara sebagian lainnya memaknainya sebagai upaya menjaga persatuan, meningkatkan literasi digital, atau berkontribusi melalui profesi dan kemampuan yang dimiliki. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa makna bela negara tidak bersifat tunggal, melainkan dibentuk oleh pengalaman sosial yang berbeda pada setiap individu (Afifi et. al., 2024).

Konsep bahasa merujuk pada proses komunikasi yang memungkinkan manusia membangun dan mempertukarkan makna. Bahasa tidak hanya dipahami sebagai alat komunikasi verbal, tetapi juga mencakup simbol, narasi, istilah, maupun representasi yang berkembang dalam masyarakat. Dalam era digital, proses pembentukan makna tidak lagi terbatas pada interaksi tatap muka, tetapi juga berlangsung melalui media sosial, platform digital, dan berbagai ruang komunikasi virtual. Generasi Z sebagai kelompok yang tumbuh dalam lingkungan digital memperoleh berbagai informasi mengenai bela negara dan Komcad melalui TikTok, Instagram, YouTube, maupun media daring lainnya. Akibatnya, pemahaman mereka terhadap bela negara banyak dipengaruhi oleh narasi, diskursus, dan simbol-simbol yang beredar dalam ruang digital tersebut (Nathaniela & Megawati, 2025; Susanto & Haryanegara, 2025).

Sementara itu, konsep pemikiran (*thought*) menjelaskan proses internal individu dalam menafsirkan simbol yang diterima melalui interaksi sosial. Individu tidak secara otomatis menerima makna yang diberikan oleh lingkungan, tetapi melakukan proses refleksi dan interpretasi sebelum membentuk pemahaman tertentu. Dalam konteks bela negara, Generasi Z dapat menerima berbagai informasi mengenai nasionalisme, pertahanan negara, maupun Komcad, namun setiap individu memiliki kemungkinan menghasilkan interpretasi yang berbeda. Proses berpikir tersebut dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, lingkungan sosial, tingkat pendidikan, serta intensitas paparan informasi yang diterima (Widiarti et. al., 2023).

Pendekatan interaksi simbolik menjadi relevan untuk mengkaji konstruksi makna bela negara karena konsep bela negara sendiri merupakan konstruksi sosial yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Afifi et. al. (2024) menjelaskan bahwa bela negara tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai slogan normatif atau aktivitas yang berorientasi pada aspek militer semata. Bela negara telah mengalami transformasi makna menjadi praktik kewargaan yang mencakup partisipasi sosial, penguatan nilai kebangsaan, literasi digital, serta kontribusi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Transformasi makna tersebut menunjukkan bahwa konsep bela negara merupakan hasil interpretasi sosial yang terus mengalami rekonstruksi sesuai dengan konteks generasi dan perkembangan masyarakat.

Dalam perspektif interaksi simbolik, Program Komponen Cadangan juga dapat dipahami sebagai simbol sosial yang mengandung berbagai makna. Secara normatif, Komcad dirancang sebagai instrumen pendukung pertahanan negara yang memungkinkan warga negara berpartisipasi dalam sistem pertahanan semesta. Namun, makna Komcad yang berkembang di masyarakat tidak selalu identik dengan tujuan normatif yang dirumuskan pemerintah. Sejumlah penelitian menunjukkan adanya beragam persepsi mengenai Komcad, mulai dari simbol patriotisme, kedisiplinan, pengabdian kepada negara, hingga simbol militerisasi warga sipil dan potensi risiko sosial tertentu (Kusuma, 2022; Herawati et. al., 2025; Suwartono, 2025). Perbedaan makna tersebut menunjukkan bahwa Komcad merupakan objek sosial yang terus dikonstruksi melalui proses interaksi dan komunikasi.

Temuan tersebut sejalan dengan berbagai penelitian internasional yang menunjukkan bahwa program pertahanan berbasis warga negara juga dimaknai secara beragam di berbagai negara. Di Swedia, Finlandia, dan Estonia, sistem conscription dipandang sebagai simbol tanggung jawab kewargaan, solidaritas nasional, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman keamanan (Ludvigsson et. al., 2022; Jonsson et. al. 2024; Lillemäe et. al., 2024). Sebaliknya, di Korea Selatan, wajib militer tidak hanya dipahami sebagai bentuk pengabdian kepada negara, tetapi juga menjadi ruang perdebatan mengenai kesetaraan sosial dan kepercayaan terhadap institusi militer (Bae & Lee, 2025). Sementara itu, pengalaman Ukraina menunjukkan bahwa partisipasi warga negara dalam sistem pertahanan memperoleh makna yang semakin kuat ketika dihadapkan pada ancaman nyata terhadap kedaulatan negara (Sanders, 2023). Variasi makna tersebut menunjukkan bahwa simbol pertahanan negara selalu dikonstruksi melalui pengalaman sosial dan konteks budaya yang berbeda.

Dalam konteks Indonesia, ASN merupakan salah satu kelompok strategis yang juga memiliki keterkaitan dengan Program Komponen Cadangan. Hidayat (2022) menjelaskan bahwa keterlibatan ASN dalam Komcad dapat mendukung penguatan kapasitas sumber daya nasional di bidang pertahanan. Sementara itu, Nurwahyu et. al. (2022) menemukan bahwa partisipasi ASN dalam Komcad berpotensi meningkatkan kesadaran bela negara dan

kesiapsiagaan nasional. Dari perspektif interaksi simbolik, keterlibatan ASN dalam Komcad dapat dimaknai sebagai simbol profesionalisme, loyalitas kepada negara, serta tanggung jawab kewargaan yang terbentuk melalui interaksi dalam lingkungan birokrasi dan kebijakan public (Vickers & Morris, 2022). Oleh karena itu, pendekatan interaksi simbolik memberikan kerangka analisis yang relevan untuk memahami bagaimana simbol-simbol bela negara diterjemahkan, dinegosiasikan, dan dimaknai oleh berbagai kelompok masyarakat, termasuk ASN, dalam konteks sosial yang terus berubah. Perspektif ini menunjukkan bahwa makna bela negara dan Komcad tidak bersifat tunggal, melainkan terbentuk melalui proses interaksi, komunikasi, serta pengalaman sosial yang berbeda pada setiap kelompok.

Bela Negara, ASN, dan Komponen Cadangan: Sebuah Tinjauan Literatur

Bela negara merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga eksistensi dan keberlangsungan negara. Dalam perspektif konstitusional, bela negara menjadi hak sekaligus kewajiban setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dari berbagai bentuk ancaman. Namun, perkembangan masyarakat dan perubahan lingkungan strategis global telah menyebabkan konsep bela negara mengalami transformasi yang signifikan. Jika pada masa lalu bela negara identik dengan perjuangan fisik dan aktivitas kemiliteran, maka pada era kontemporer konsep tersebut berkembang menjadi bentuk partisipasi yang lebih luas, meliputi penguatan nasionalisme, kepedulian sosial, literasi digital, ketahanan sosial, hingga kontribusi profesional dalam berbagai sektor kehidupan (Afifi et. al., 2024; Scott et. al., 2022; Harman et. al., 2024).

Caso (2024) menjelaskan bahwa konsep bela negara perlu direkonstruksi dari sekadar slogan normatif menuju pendekatan kewargaan yang lebih empiris dan kontekstual. Bela negara tidak lagi dipahami sebagai doktrin yang bersifat simbolik semata, tetapi sebagai praktik sosial yang diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dalam berbagai negara demokratis, partisipasi warga negara dalam sistem pertahanan juga dipahami sebagai bentuk tanggung jawab kewargaan yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap institusi negara dan komitmen terhadap kepentingan nasional (Bove et al., 2024; Kuehn & Croissant, 2023). Dengan demikian, pemahaman mengenai bela negara tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, politik, dan budaya tempat individu hidup dan berinteraksi.

Dalam konteks Indonesia saat ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu kelompok strategis dalam penguatan nilai bela negara. Sebagai unsur pelaksana kebijakan publik dan pelayan masyarakat, ASN dituntut memiliki komitmen kebangsaan, integritas, profesionalisme, serta loyalitas terhadap negara. Peran tersebut menjadikan ASN sebagai bagian penting dari sumber daya nasional yang berkontribusi dalam menjaga stabilitas nasional dan mendukung sistem pertahanan negara. Hidayat (2022) menegaskan bahwa ASN memiliki posisi strategis sebagai potensi Komponen Cadangan karena kapasitasnya sebagai unsur pemerintahan yang terorganisasi. Temuan ini diperkuat oleh Nurwahyu et. al. (2022) yang menunjukkan bahwa partisipasi ASN dalam Komcad dapat mendukung penguatan sistem pertahanan negara melalui peningkatan kesiapsiagaan dan kesadaran bela negara.

Berbagai tantangan kontemporer, seperti ancaman siber, disinformasi, polarisasi sosial, radikalisme digital, hingga gangguan terhadap stabilitas nasional, menuntut ASN untuk memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai nilai-nilai kebangsaan dan pertahanan negara. Ancaman terhadap negara saat ini tidak hanya berasal dari aspek militer, tetapi juga berkembang dalam bentuk ancaman nonmiliter yang memengaruhi kohesi sosial dan ketahanan

nasional (Citanindya & Puspa, 2025; Nathaniela & Megawati, 2025). Oleh karena itu, kesadaran bela negara pada ASN tidak hanya diwujudkan melalui kesiapan menghadapi ancaman fisik, tetapi juga melalui profesionalisme birokrasi, integritas pelayanan publik, serta kemampuan menjaga persatuan bangsa di tengah transformasi digital.

Program Komponen Cadangan dirancang untuk memberikan pelatihan dasar kemiliteran, pembinaan karakter, peningkatan kedisiplinan, serta penguatan wawasan kebangsaan. Melalui program ini, negara berupaya membangun kesiapsiagaan warga negara dalam menghadapi berbagai ancaman yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Nurwahyu et. al. (2022) menjelaskan bahwa partisipasi ASN dalam Komcad berpotensi memperkuat kesadaran bela negara dan kesiapsiagaan nasional. Hidayat (2022) juga menegaskan bahwa keterlibatan ASN dalam Komcad merupakan kebutuhan strategis untuk mendukung sistem pertahanan negara yang melibatkan seluruh potensi nasional. Selain itu, Rahman et al. (2023) menunjukkan bahwa komunikasi persuasif dan pemahaman mengenai bela negara berpengaruh terhadap kemauan individu untuk bergabung dalam Komcad, sedangkan Samosir et. al. (2023) menilai bahwa implementasi Komcad memiliki potensi memperkuat budaya pertahanan dalam lingkungan pendidikan dan masyarakat.

Praktik pelibatan warga negara dalam sistem pertahanan bukan hanya diterapkan di Indonesia. Jonsson et. al. (2024) menunjukkan bahwa sistem conscription di enam negara Eropa memiliki fungsi yang beragam, mulai dari penguatan pertahanan hingga pembentukan identitas kewargaan. Di Swedia dan Finlandia, wajib militer dipandang sebagai instrumen yang memperkuat kesiapsiagaan nasional dan tanggung jawab warga negara terhadap negara (Ludvigsson et. al., 2022; Kosonen & Mälkki, 2022). Estonia juga memanfaatkan sistem conscription sebagai strategi memperkuat ketahanan negara kecil yang menghadapi tantangan keamanan regional (Lillemäe et. al., 2024; Kvamldze, 2023). Di Ukraina, reformasi militer yang melibatkan partisipasi warga negara menjadi faktor penting dalam memperkuat kemampuan pertahanan menghadapi invasi Rusia (Sanders, 2023). Sementara itu, Korea Selatan menunjukkan bahwa sistem wajib militer tidak selalu dimaknai secara positif karena dapat memunculkan perdebatan mengenai keadilan gender, kepercayaan terhadap institusi militer, dan kewajiban kewargaan (Bae & Lee, 2025; Changhoon, 2023). Pada konteks lain, Rusia menunjukkan bagaimana sistem conscription juga berkaitan dengan konstruksi maskulinitas dan budaya militer dalam masyarakat (Eichler, 2022).

Meskipun demikian, implementasi Komcad juga memunculkan berbagai respons dan perdebatan. Kusuma (2022) menemukan bahwa sebagian masyarakat masih memiliki kekhawatiran terkait konsekuensi sosial dan ekonomi yang mungkin muncul akibat keterlibatan dalam program tersebut. Suwartono (2025) menunjukkan adanya persoalan normatif yang berkaitan dengan status hukum anggota Komcad, sedangkan Baran (2024) menekankan bahwa program pertahanan berbasis wajib militer maupun cadangan perlu memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Perspektif serupa juga ditemukan dalam kajian (Caltekin, 2022) mengenai keberatan terhadap wajib militer sebagai bagian dari hak individu dalam negara demokratis.

Komponen Cadangan dalam Kerangka Interaksi Simbolik: Sebuah Tinjauan

Dalam perspektif interaksi simbolik, suatu objek sosial tidak hanya dipahami berdasarkan fungsi formalnya, tetapi juga berdasarkan makna yang dikonstruksi oleh individu maupun kelompok sosial terhadap objek tersebut. Herbert Blumer (1969) menjelaskan bahwa

manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna yang dimiliki terhadap sesuatu tersebut. Makna tersebut muncul melalui interaksi sosial dan selanjutnya dimodifikasi melalui proses interpretasi yang berlangsung secara terus-menerus (Citanindya & Puspa, 2025). Berdasarkan pandangan tersebut, Program Komponen Cadangan (Komcad) tidak hanya dapat dipahami sebagai instrumen pertahanan negara, tetapi juga sebagai simbol sosial yang mengandung berbagai makna di tengah masyarakat.

Secara normatif, Komcad merupakan bagian dari sistem pertahanan semesta yang dirancang untuk memperbesar dan memperkuat kemampuan pertahanan negara melalui pelibatan sumber daya nasional yang telah dipersiapkan sebelumnya. Melalui program ini, negara berupaya menanamkan nilai kedisiplinan, nasionalisme, loyalitas terhadap negara, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman nasional. Dalam kerangka tersebut, Komcad diposisikan sebagai representasi konkret dari implementasi bela negara yang dapat diwujudkan melalui partisipasi warga negara dalam sistem pertahanan nasional (Hidayat, 2022; Nurwahyu et. al., 2022).

Namun, interaksi simbolik memandang bahwa makna suatu program tidak selalu identik dengan tujuan yang dirumuskan oleh pembuat kebijakan. Makna justru terbentuk melalui pengalaman sosial, komunikasi, dan interpretasi individu terhadap simbol yang diterimanya. Oleh karena itu, Komcad dapat memiliki makna yang berbeda-beda bagi setiap kelompok masyarakat. Bagi sebagian individu, Komcad dipahami sebagai simbol patriotisme dan kecintaan terhadap tanah air. Keterlibatan dalam program tersebut dianggap sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa sekaligus wujud tanggung jawab sebagai warga negara. Dalam pemaknaan ini, Komcad menjadi simbol komitmen terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keberlanjutan sistem pertahanan nasional.

Di sisi lain, sebagian masyarakat memaknai Komcad sebagai sarana pembentukan karakter dan pengembangan kapasitas diri. Pelatihan dasar kemiliteran, pembinaan mental, serta pendidikan kebangsaan yang diberikan dalam program tersebut dipersepsikan sebagai media untuk meningkatkan kedisiplinan, kepemimpinan, kemampuan bekerja sama, dan rasa tanggung jawab. Perspektif ini menunjukkan bahwa Komcad tidak semata-mata dilihat sebagai instrumen pertahanan negara, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran sosial yang mampu membentuk kualitas individu. Temuan Herawati et. al. (2025) menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki kecenderungan memandang Komcad sebagai sarana pengembangan diri yang dapat memberikan pengalaman baru sekaligus memperkuat wawasan kebangsaan.

Dalam konteks lain, Komcad juga dapat dimaknai sebagai simbol partisipasi kewargaan. Afifi et. al. (2024) menjelaskan bahwa konsep bela negara pada era kontemporer perlu dipahami sebagai praktik kewargaan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keberlangsungan bangsa. Berdasarkan perspektif tersebut, keterlibatan dalam Komcad dapat dipahami sebagai bentuk kontribusi warga negara dalam mendukung sistem pertahanan nasional. Makna ini menunjukkan adanya pergeseran dari paradigma pertahanan yang berpusat pada institusi militer menuju paradigma pertahanan yang melibatkan partisipasi masyarakat secara lebih luas.

Fenomena perbedaan makna terhadap program pertahanan berbasis partisipasi warga negara juga ditemukan di berbagai negara. Jonsson et. al. (2024) menjelaskan bahwa sistem conscription di sejumlah negara Eropa dimaknai tidak hanya sebagai instrumen pertahanan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan identitas kewargaan dan kohesi sosial. Di Finlandia

dan Swedia, partisipasi dalam sistem pertahanan dipandang sebagai bentuk tanggung jawab warga negara terhadap keamanan nasional (Kosonen & Mälkki, 2022; Ludvigsson et. al., 2022). Sementara itu, Estonia memandang conscription sebagai instrumen penting dalam memperkuat ketahanan negara dan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman keamanan (Lillemäe et. al., 2024; Kvamldze, 2023). Sebaliknya, penelitian Bae & Lee (2025) menunjukkan bahwa wajib militer di Korea Selatan dapat memunculkan perdebatan mengenai keadilan sosial dan kepercayaan terhadap institusi militer. Eichler (2022) juga menjelaskan bahwa sistem conscription di Rusia turut membentuk konstruksi budaya militer dan identitas sosial masyarakat. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa program pertahanan berbasis partisipasi warga negara selalu menghasilkan beragam interpretasi yang dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan budaya masing-masing negara.

Meskipun demikian, konstruksi makna terhadap Komcad tidak selalu bersifat positif. Sejumlah kajian menunjukkan adanya kelompok masyarakat yang memandang Komcad sebagai simbol yang kontroversial. Kusuma (2022) menemukan bahwa sebagian masyarakat memiliki kekhawatiran terhadap konsekuensi sosial dan ekonomi yang mungkin muncul akibat keterlibatan dalam program tersebut. Kekhawatiran mengenai potensi kehilangan pekerjaan, gangguan terhadap aktivitas profesional, maupun ketidakjelasan posisi peserta setelah mengikuti program menjadi faktor yang memengaruhi munculnya persepsi tersebut. Dalam perspektif interaksi simbolik, pandangan tersebut merupakan hasil interpretasi individu terhadap informasi dan pengalaman sosial yang mereka peroleh mengenai Komcad.

Selain itu, Suwartono (2025) menunjukkan bahwa diskursus mengenai status hukum anggota Komcad turut memengaruhi cara masyarakat memaknai program tersebut. Ketika masyarakat menemukan adanya perdebatan mengenai aspek regulasi dan posisi hukum anggota Komcad, simbol yang semula dimaksudkan sebagai representasi bela negara dapat mengalami perubahan makna menjadi objek perdebatan publik. Fenomena ini menunjukkan bahwa makna suatu simbol tidak pernah bersifat tetap, melainkan selalu dinegosiasikan melalui proses interaksi sosial yang berlangsung dalam masyarakat.

Dalam era digital, proses pembentukan makna terhadap Komcad semakin kompleks. Media sosial memungkinkan berbagai pihak memproduksi, menyebarluaskan, dan menginterpretasikan informasi mengenai Komcad secara bebas. Informasi yang beredar tidak hanya berasal dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga dari media massa, akademisi, influencer, komunitas digital, maupun masyarakat umum. Akibatnya, simbol Komcad mengalami proses reproduksi makna yang berlangsung secara terus-menerus di ruang publik digital. Dalam era digital, proses pembentukan makna terhadap Komcad semakin kompleks karena informasi mengenai program tersebut beredar melalui berbagai saluran komunikasi, baik media massa maupun media sosial. Nathaniela & Megawati (2025) menjelaskan bahwa media digital telah menjadi arena penting dalam pembentukan narasi kebangsaan dan nasionalisme digital. Akibatnya, pemahaman mengenai Komcad tidak hanya dibentuk oleh sosialisasi pemerintah, tetapi juga oleh diskursus publik yang berkembang di ruang digital.

Bagi ASN, pemaknaan terhadap Komcad dibentuk melalui berbagai pengalaman sosial dan profesional yang berbeda. Sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN memiliki kedekatan dengan struktur birokrasi dan kebijakan negara yang dapat memengaruhi cara mereka memahami Komcad. Namun demikian, pemahaman tersebut tidak bersifat seragam karena

dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, lingkungan organisasi, serta informasi yang diperoleh melalui berbagai media komunikasi. Oleh karena itu, ASN dapat memaknai Komcad sebagai bentuk pengabdian kepada negara, instrumen peningkatan disiplin, sarana pengembangan kapasitas diri, maupun kebijakan yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Berdasarkan perspektif interaksi simbolik, keberagaman makna tersebut merupakan konsekuensi logis dari proses interaksi sosial yang melibatkan simbol, bahasa, dan interpretasi. Komcad tidak memiliki makna yang tunggal dan bersifat universal, melainkan menjadi arena konstruksi sosial yang terus dibentuk melalui komunikasi dan pengalaman sosial masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman mengenai Komcad tidak dapat hanya dilihat dari aspek regulasi dan tujuan formal program, tetapi juga perlu dipahami melalui cara ASN membangun, menafsirkan, dan merekonstruksi makna yang melekat pada program tersebut melalui pengalaman profesional dan interaksi sosial yang mereka alami. Dengan demikian, Komcad dapat dipahami bukan hanya sebagai instrumen pertahanan negara, melainkan juga sebagai simbol sosial yang terus mengalami proses negosiasi makna dalam lingkungan birokrasi dan masyarakat kontemporer.

Dialektika Simbol, Makna, dan Tindakan dalam Konstruksi Bela Negara pada ASN

Dalam perspektif interaksi simbolik, perilaku manusia tidak muncul secara spontan, melainkan melalui proses interpretasi terhadap simbol-simbol yang ditemui dalam kehidupan sosial. Blumer (1969) menjelaskan bahwa individu bertindak berdasarkan makna yang mereka berikan terhadap suatu objek, sementara makna tersebut lahir dari interaksi sosial dan terus berkembang melalui proses interpretasi yang berkelanjutan (Tresch et. al., 2025). Oleh karena itu, pemahaman ASN mengenai bela negara dan Program Komponen Cadangan (Komcad) tidak dapat dilepaskan dari proses sosial yang membentuk cara mereka memandang kedua konsep tersebut. Bagi ASN, bela negara tidak hanya dipahami sebagai kewajiban konstitusional, tetapi juga sebagai bagian dari etika pengabdian kepada negara yang diwujudkan melalui pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik (Hidayat, 2022; Nurwahyu et. al., 2022).

Dalam kerangka interaksi simbolik, Komcad dapat dipahami sebagai simbol sosial yang membawa pesan tertentu mengenai nasionalisme, patriotisme, pengabdian, kedisiplinan, dan tanggung jawab kewargaan. Namun simbol tersebut tidak selalu dimaknai secara seragam oleh setiap individu. Makna yang muncul sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial, pengalaman pribadi, lingkungan pendidikan, serta sumber informasi yang diakses oleh individu. Akibatnya, simbol yang sama dapat menghasilkan interpretasi yang berbeda-beda. Sebagian ASN memandang Komcad sebagai bentuk aktualisasi bela negara yang relevan dengan tugas pengabdian kepada negara, sedangkan sebagian lainnya melihat program tersebut sebagai kebijakan yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan, implikasi pekerjaan, maupun status kepegawaiannya (Hidayat, 2022; Nurwahyu et. al., 2022).

Lingkungan kerja birokrasi menjadi ruang sosial utama dalam pembentukan makna bela negara pada ASN. Melalui interaksi sehari-hari dengan pimpinan, rekan kerja, aturan organisasi, serta budaya kerja pemerintahan, ASN memperoleh berbagai simbol dan nilai yang berkaitan dengan pengabdian kepada negara. Nilai profesionalisme, loyalitas terhadap konstitusi, disiplin, dan pelayanan publik menjadi bagian dari proses sosialisasi yang membentuk cara ASN memandang bela negara maupun Program Komcad. Dalam perspektif

interaksi simbolik, pengalaman organisasi tersebut berkontribusi dalam membangun interpretasi ASN terhadap peran mereka dalam mendukung ketahanan nasional.

Selain lingkungan birokrasi, pendidikan dan pelatihan kedinasan juga memiliki peran strategis dalam membentuk konstruksi makna bela negara pada ASN. Berbagai program orientasi, pendidikan dasar ASN, pelatihan kepemimpinan, serta pembinaan wawasan kebangsaan menjadi media sosialisasi yang memperkenalkan nilai-nilai bela negara dalam konteks pengabdian kepada masyarakat dan negara. Hidayat (2022) menjelaskan bahwa keterlibatan ASN dalam sistem pertahanan negara, termasuk melalui Komponen Cadangan (Komcad), merupakan bagian dari upaya memperkuat pertahanan nasional melalui optimalisasi sumber daya manusia aparatur. Melalui proses pendidikan dan pembinaan tersebut, ASN memperoleh berbagai simbol, narasi, dan pemahaman mengenai tanggung jawab kewargaan, profesionalisme, serta peran strategis aparatur negara dalam menjaga stabilitas nasional. Pemahaman tersebut kemudian memengaruhi cara ASN menilai berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pertahanan negara, termasuk Program Komcad.

Selain itu, lingkungan kerja, komunitas profesi, dan jaringan birokrasi juga menjadi ruang penting dalam pembentukan makna. Interaksi yang berlangsung dengan pimpinan, rekan kerja, maupun sesama ASN memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, pengalaman, dan pandangan mengenai berbagai isu kebangsaan dan pertahanan negara. Dalam banyak kasus, budaya organisasi dan opini kelompok memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pembentukan persepsi individu. Ketika lingkungan kerja memandang Komcad sebagai bentuk pengabdian dan kontribusi terhadap negara, ASN cenderung mengembangkan persepsi yang serupa. Sebaliknya, ketika muncul pandangan yang lebih kritis mengenai implikasi kebijakan tersebut terhadap tugas kedinasan maupun karier aparatur, individu berpotensi mengadopsi interpretasi yang sama. Fenomena ini menunjukkan bahwa makna dibangun secara kolektif melalui proses interaksi sosial yang berlangsung dalam lingkungan birokrasi sehari-hari.

Perkembangan teknologi digital semakin memperluas ruang pembentukan makna pada ASN. Digitalisasi birokrasi dan meningkatnya penggunaan media sosial menjadikan ASN tidak hanya memperoleh informasi melalui saluran formal organisasi, tetapi juga melalui berbagai platform digital yang menyediakan beragam perspektif mengenai isu kebangsaan dan pertahanan negara. Dalam perspektif interaksi simbolik, media sosial menjadi arena baru tempat berlangsungnya pertukaran simbol dan negosiasi makna. Berbagai konten mengenai bela negara, nasionalisme, maupun Komcad dapat dengan mudah diakses dan ditafsirkan oleh ASN. Akibatnya, proses pembentukan makna tidak lagi hanya berlangsung melalui interaksi tatap muka dalam lingkungan kerja, tetapi juga melalui interaksi virtual yang terjadi secara berkelanjutan (Nathaniela & Megawati, 2025; Citanindya & Puspa, 2025).

Nathaniela & Megawati (2025) menjelaskan bahwa media sosial berperan penting dalam membentuk nasionalisme digital dan memperkuat penyebaran nilai-nilai kebangsaan. Melalui media sosial, ASN tidak hanya menerima informasi, tetapi juga berpartisipasi dalam memproduksi dan menyebarkan makna melalui diskusi, komentar, maupun berbagi pengalaman terkait isu-isu kebangsaan. Aktivitas tersebut menunjukkan bahwa ASN bukan sekadar penerima informasi, melainkan aktor aktif yang turut membangun realitas sosial melalui interaksi digital. Dalam konteks Komcad, berbagai narasi yang berkembang di media sosial turut berkontribusi dalam membentuk persepsi ASN terhadap program tersebut.

Proses konstruksi makna yang terjadi pada ASN selanjutnya memengaruhi tindakan yang mereka ambil. Dalam teori interaksi simbolik, tindakan merupakan hasil dari interpretasi terhadap makna yang dimiliki individu. Ketika Komcad dimaknai sebagai bentuk patriotisme, pengabdian kepada negara, dan bagian dari tanggung jawab aparatur negara, ASN cenderung menunjukkan sikap positif terhadap program tersebut, termasuk keinginan untuk berpartisipasi di dalamnya. Sebaliknya, apabila Komcad dimaknai sebagai program yang belum dipahami secara menyeluruh atau berpotensi menimbulkan konsekuensi tertentu terhadap tugas kedinasan, individu dapat menunjukkan sikap yang lebih pasif maupun kritis. Rahman et al. (2023) menunjukkan bahwa komunikasi persuasif dan niat berperilaku memiliki hubungan dengan kemauan seseorang untuk menjadi bagian dari Komcad. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Nurwahyu et. al. (2022) yang menunjukkan bahwa partisipasi ASN dalam Komcad dipandang sebagai salah satu bentuk kontribusi dalam memperkuat sistem pertahanan negara.

Dengan demikian, hubungan antara simbol, makna, dan tindakan membentuk suatu proses dialektis yang berlangsung secara berkelanjutan. Komcad sebagai simbol menghasilkan berbagai interpretasi yang membentuk makna bela negara pada ASN. Makna tersebut kemudian memengaruhi sikap dan tindakan ASN terhadap program Komcad maupun terhadap praktik bela negara secara umum. Selanjutnya, tindakan yang muncul akan kembali menghasilkan pengalaman sosial baru yang berpotensi membentuk makna berikutnya. Proses yang terus berulang ini menunjukkan bahwa konstruksi bela negara pada ASN merupakan fenomena sosial yang dinamis dan selalu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi, sosial, budaya, dan teknologi yang melingkupinya.

Memotret Dinamika Bela Negara di Era Digital: Media Sosial, ASN, dan Komcad

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi, membangun persepsi, serta memaknai berbagai kebijakan publik, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan pertahanan negara. Transformasi tersebut juga memengaruhi cara Aparatur Sipil Negara (ASN) memahami konsep bela negara dan Program Komponen Cadangan (Komcad). Jika pada masa lalu proses sosialisasi nilai-nilai kebangsaan lebih banyak berlangsung melalui pendidikan formal dan lingkungan organisasi secara langsung, maka saat ini media digital telah menjadi ruang interaksi baru yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan makna dan persepsi ASN. Kondisi ini menunjukkan bahwa konstruksi makna bela negara tidak lagi berlangsung secara konvensional, tetapi berkembang melalui interaksi yang semakin dinamis dalam ruang digital.

Dalam perspektif interaksi simbolik, media sosial dapat dipahami sebagai arena pertukaran simbol yang memungkinkan individu membentuk, menegosiasikan, dan merekonstruksi makna terhadap suatu objek sosial. Berbagai informasi mengenai nasionalisme, pertahanan negara, serta Komcad beredar melalui platform digital seperti YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, maupun X. Informasi tersebut tidak hanya menyampaikan pesan formal, tetapi juga menghadirkan simbol, narasi, dan representasi tertentu yang memengaruhi cara ASN memandang suatu kebijakan. Nathaniela & Megawati (2025) menjelaskan bahwa media sosial memiliki peran penting dalam memperkuat nilai bela negara dan nasionalisme digital. Dalam konteks tersebut, media digital menjadi ruang yang memungkinkan ASN membangun pemahaman mengenai tanggung jawab kewargaan dan peran mereka dalam mendukung ketahanan nasional.

Bagi ASN, media digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai sumber informasi yang memengaruhi cara mereka memahami berbagai isu strategis negara. Berbagai informasi mengenai Komcad, kebijakan pertahanan, maupun isu keamanan nasional dapat diakses secara cepat melalui platform digital. Akibatnya, persepsi ASN terhadap Komcad tidak hanya dibentuk melalui sosialisasi formal pemerintah, tetapi juga melalui interaksi dengan berbagai informasi, opini publik, diskusi profesional, serta pengalaman yang dibagikan oleh pengguna lain di ruang digital. Fenomena ini menunjukkan bahwa proses pembentukan makna terhadap Komcad semakin dipengaruhi oleh interaksi sosial yang berlangsung dalam lingkungan digital.

Di sisi lain, perkembangan media digital juga menghadirkan tantangan dalam penguatan nilai bela negara. Kemudahan akses informasi memungkinkan munculnya berbagai narasi yang saling bersaing dalam memengaruhi opini publik. Informasi yang tidak terverifikasi, disinformasi, maupun interpretasi yang keliru terhadap kebijakan negara dapat memengaruhi cara ASN memandang Komcad dan konsep bela negara secara umum. Citanindya & Puspa (2025) menjelaskan bahwa ancaman nonmiliter di era digital tidak hanya berbentuk ancaman terhadap sistem teknologi, tetapi juga ancaman terhadap kesadaran kebangsaan dan ketahanan sosial masyarakat. Oleh karena itu, literasi digital menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat bela negara pada era informasi.

Dalam konteks tersebut, makna bela negara mengalami perluasan yang menyesuaikan perkembangan zaman. Bela negara tidak lagi hanya diwujudkan melalui kesiapan menghadapi ancaman fisik, tetapi juga melalui kemampuan menjaga ruang digital dari hoaks, ujaran kebencian, polarisasi sosial, serta berbagai bentuk ancaman informasi lainnya. RICHARDS (2024) menjelaskan bahwa bela negara pada era kontemporer perlu dipahami sebagai praktik kewargaan yang diwujudkan melalui kontribusi nyata dalam kehidupan sosial. Bagi ASN, praktik tersebut dapat diwujudkan melalui pelayanan publik yang profesional, penguatan integritas birokrasi, serta partisipasi aktif dalam menjaga stabilitas informasi di ruang digital.

Dalam kaitannya dengan Komcad, media digital turut menjadi ruang pembentukan citra dan persepsi publik terhadap program tersebut. Berbagai informasi mengenai pelatihan, pengalaman peserta, manfaat program, maupun berbagai perdebatan yang muncul di masyarakat dapat memengaruhi cara ASN memaknai Komcad. Sebagian ASN memandang Komcad sebagai simbol patriotisme, disiplin, dan pengabdian kepada negara. Namun sebagian lainnya memandang program tersebut sebagai kebijakan yang masih memerlukan sosialisasi dan pemahaman yang lebih mendalam terkait implementasinya (Hidayat (2022; Nurwahyu et. al., 2022)). Perbedaan interpretasi tersebut menunjukkan bahwa makna Komcad terus diproduksi dan direproduksi melalui proses komunikasi yang berlangsung dalam ruang publik digital.

Dari perspektif interaksi simbolik, dinamika tersebut menunjukkan bahwa makna bela negara pada ASN tidak bersifat tetap, melainkan terus mengalami proses negosiasi melalui interaksi sosial yang berlangsung baik di lingkungan birokrasi maupun di ruang digital. Simbol-simbol kebangsaan yang dahulu banyak dibangun melalui institusi formal kini turut dipengaruhi oleh media sosial, komunitas digital, serta berbagai aktor yang terlibat dalam ruang komunikasi daring. Oleh karena itu, penguatan nilai bela negara pada ASN memerlukan strategi komunikasi yang adaptif, partisipatif, dan sesuai dengan karakteristik masyarakat digital. Dengan demikian, bela negara tidak hanya dipahami sebagai kewajiban normatif

aparatur negara, tetapi juga sebagai identitas sosial yang terus dibentuk melalui pengalaman, interaksi, dan partisipasi aktif dalam kehidupan digital kontemporer.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa makna bela negara pada Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan hasil konstruksi sosial yang terbentuk melalui proses interaksi, komunikasi, dan interpretasi terhadap berbagai simbol kebangsaan yang berkembang dalam lingkungan birokrasi, pendidikan, media, maupun kehidupan sosial sehari-hari. Dalam perspektif interaksi simbolik, ASN tidak dipandang sebagai pelaksana kebijakan yang pasif, melainkan sebagai aktor sosial yang secara aktif membangun dan menafsirkan makna bela negara berdasarkan pengalaman, nilai organisasi, interaksi profesional, serta pemahaman mereka terhadap peran sebagai abdi negara. Program Komponen Cadangan (Komcad) sebagai salah satu instrumen pertahanan negara dimaknai secara beragam oleh ASN, mulai dari simbol patriotisme, tanggung jawab kewargaan, pengabdian kepada negara, sarana pembentukan karakter dan kedisiplinan, hingga bentuk partisipasi dalam sistem pertahanan semesta. Keberagaman makna tersebut menunjukkan bahwa pemahaman terhadap bela negara dan Komcad tidak bersifat tunggal, melainkan terus dikonstruksi melalui proses interaksi sosial yang berlangsung dalam berbagai konteks kehidupan ASN.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifi, A. A., Andriyaldi, A., & Adrian, H. (2024). Reconstructing the Concept of Bela Negara: From Excessive Jargon to an Empirical Civic-based Approach. *Perwakilan: Journal of Good Governance, Diplomacy, Customary Institutionalization and Social Networks*, 2(2), 81–92.
- Afifi, A. A., Andriyaldi, A., & Adrian, H. (2024). Reconstructing the Concept of Bela Negara: From Excessive Jargon to an Empirical Civic-based Approach. *Perwakilan: Journal of Good Governance, Diplomacy, Customary Institutionalization and Social Networks*, 2(2), 81–92.
- Bae, J., & Lee, Y. J. (2025). How Mandatory Military Service Can Divide Rather Than Unite: Conscription, Gender, and Military Trust in South Korea 2003–2021. *Armed Forces & Society*, 51(3), 860–882.
- Baran, A. (2024). Conscription, coercion and International human rights law. *Visegrad Journal on Human Rights*, 3, 20–28.
- Blumer, H. (1969). *Social Interactionism: Perspektif and Method* (1st Ed). University of California Press.
- Blumer, H. (1980). Mead and Blumer: The convergent methodological perspectives of social behaviorism and symbolic interactionism. *American Sociological Review*, 45(3), 409–419.
- Bove, V., Di Leo, R., & Giani, M. (2024). Military culture and institutional trust: evidence from conscription reforms in Europe. *American Journal of Political Science*, 68(2), 714–729.
- Caltekin, D. A. (2022). *Conscientious Objection in Turkey: A Socio-legal Analysis of the Right to Refuse Military Service*. Edinburgh University Press.
- Caso, F. (2024). *Settler Military Politics: Militarisation and the Aesthetics of War Commemoration*. Edinburgh University Press.
- Changhoon, S. (2023). The ‘Korean’ Resolution of the Doctorless Village Crisis and the Entanglement with the Conscription System in South Korea in the 1950s-70s. *Korean*

- Journal of Medical History Ūi Sahak*, 32(3), 1043.
- Charon, J. (1979). *Symbolic Interactionisme*. Prentice Hall Inc.
- Citanindya, C., & Puspa, T. (2025). Literasi Digital dan Bela Negara: Resiliensi Generasi Z terhadap Ancaman Non-Militer dalam Perspektif Kebangsaan. *Jurnal Pendidikan Dan Pengembangan Sumber Daya Pertahanan*, 2(2), 44–52.
- Eichler, M. (2022). *Militarizing men: Gender, conscription, and war in post-soviet Russia*. Academic Studies Press.
- Harman, J., Edelman, E. S., Keane, J. M., Mahnken, T. G., Rudman, M., Sixkiller, M., ... & Wasser, B. (2024). *Commission on the national defense strategy*. Commission on the National Defense Strategy.
- Hasim, I. S., Widiastuti, I., & Sudradjat, I. (2023). Symbolic interactionism in vernacular cultural landscape research. *ARTEKS: Jurnal Teknik Arsitektur*, 8(1), 135–144.
- Herawati, T., Muchlis, M., Saksono, M. S., & Leandro, S. F. (2025). Persepsi Mahasiswa Di Magelang Terhadap Perekrutan Warga Negara Sebagai Komponen Cadangan TNI. *JURNAL MAHATVAVIRYA*, 12(1), 47–55.
- Hidayat, F. (2022). Urgensi Kebijakan Rekrutmen Aparatur Sipil Negara dalam Komponen Cadangan. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 5(1), 29–38.
- Jonsson, E., Salo, M., Lillemäe, E., Steder, F. B., Ferst, T., Kasearu, K., ... & Truusa, T. T. (2024). Multifaceted conscription: A comparative study of six European countries. *Scandinavian Journal of Military Studies*, 20–33.
- Kosonen, J., & Mälkki, J. (2022). The Finnish model of conscription. In *Successful Public Policy in the Nordic Countries: Cases, Lessons, Challenges*. Oxford University Press.
- Kuehn, D., & Croissant, A. (2023). *Routes to reform: civil-military relations and democracy in the third wave*. Oxford University Press.
- Kusuma, A. C. (2022). Problematika Pembentukan Komponen Cadangan: Dilema Partisipasi Bela Negara di Tengah Ancaman Pemutusan Hubungan Kerja. *Jurnal Sosial Humaniora*, 15(2), 73–89.
- Kvamladze, T. (2023). *Conscription in Estonia and Georgia: lessons from and for small-state peers*. International Centre for Defence and Security (ICDS).
- Lillemäe, E., Kasearu, K., & Ben-Ari, E. (2024). Conscription and social transformations: Estonia between security needs and social expectations. *Journal of Baltic Studies*, 55(2), 251–270.
- Ludvigsson, J. F., Berglind, D., Sundquist, K., Sundström, J., Tynelius, P., & Neovius, M. (2022). The Swedish military conscription register: opportunities for its use in medical research: JF Ludvigsson et al. *European Journal of Epidemiology*, 37(7), 767–777.
- Mead, G. H. (1934). *Mind, self, and society from the standpoint of a social behaviorist* (Ed (ed.)).
- Nathaniela, S., & Megawati, S. (2025). Peran Media Sosial dalam Penguatan Nilai Bela Negara dan Nasionalisme Digital di Kalangan Generasi Muda. *Jurnal Pendidikan Merdeka Belajar*, 3(1), 11–18.
- Nurwahyu, P., Felani, H., Soebagijo, N. H., Al-Mubaroq, H. Z., & Marnani, C. S. (2022). Tingkat Partisipasi Aparatur Sipil Negara (Asn) Sebagai Komponen Cadangan Dalam Rangka Memperkuat Pertahanan Negara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 7(1), 63–71.
- Rahman, A. A., Malik, I., & Tirto, D. (2023). Hubungan Niat Berperilaku Dan Komunikasi Persuasif Terhadap Kemauan Menjadi Bagian Dari Komponen Cadangan Dalam Pendidikan Bela Negara. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 13(1).
- RICHARDS, P. G. (2024). *Parliament and conscience*. Routledge.
- Samosir, J. F., Mulyadi, D. R., & Hanita, M. (2023). Analisa kebijakan terhadap implementasi program komponen cadangan pada sistem pendidikan nasional di perguruan tinggi

- indonesia. *Jurnal Pertahanan Dan Bela Negara*, 13(2), 144–158.
- Sanders, D. (2023). Ukraine's third wave of military reform 2016–2022–building a military able to defend Ukraine against the Russian invasion. *Defense & Security Analysis*, 39(3), 312–328.
- Scott, W. J., De Angelis, K. M., & Segal, D. (2022). *Military sociology: A guided introduction*. Routledge.
- Susanto, B. A., & Haryanegara, M. E. A. (2025). YouTube as Informal Classroom: Symbolic Interactionism and Educational Communication for Cultural Learning. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Research*, 5(2), 403–410.
- Suwartono, R. D. B. (2025). Problema Dualisme Personalitas Hukum Pada Anggota Komponen Cadangan Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 32(2), 417–450.
- Tresch, T. S., Kasearu, K., & T. S. T. (2025). *Conscription as Subject of National Security*.
- Vickers, E., & Morris, P. (2022). Accelerating Hong Kong's reeducation: 'mainlandisation', securitisation and the 2020 National Security Law. *Comparative Education*, 58(2), 187–205.
- Widiarti, L., Anindya, P. P., & Genoveva, P. K. (2023). The Review of Symbolic Interactionism Theory an Adolescent Self-Actualization through Korean Popular Culture. *Jurnal Komunikasi Dan Bisnis*, 11(2), 191–205.